



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 145 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
  - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
  - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

### BAB III

#### KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

#### Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

## BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 156

salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
BANDUNG  
NOMOR 156 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



Pemerintah  
Kabupaten Bandung



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN CIKANCUNG



TAHUN 2025

## **KATA PENGANTAR**

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah, Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk melakukan analisis kebutuhan tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang komprehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Cikancung Tahun 2025.

Bahwa Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Cikancung sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyesuaian arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini berguna bagi Kecamatan Cikancung dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupaten Bandung

Cikancung, 26 Juni 2025

**CAMAT CIKANCUNG**

**SUDRAJAT**

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
	1.1 Latar Belakang .....	4
	2.1 Landasan Hukum .....	5
	3.1 Maksud dan Tujuan .....	6
	4.1 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
	2.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	18
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	20
	2.4 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja RKPD .....	24
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>43</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	43
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	43
	3.3 Program Kegiatan .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>67</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>74</b>

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Perubahan Rencana Kerja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Renja tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi yang secara melekat dan diberikn berdasarkan Undang – undang (kewenangan Atributif) dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan (Kewenangan Delegatif), Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi camat yang sekaligus merupakan tugas dan fungsi Kecamatan diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang secara substansi meliputi adanya Tujuan dan

---

Sasaran yang menggambarkan adanya Target yang akan dicapai sebagai acuan dalam pengukuran kinerja sehingga memberikan gambaran terhadap capaian kinerja untuk setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari Perencanaan, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan)

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Perubahan Rencana Kerja merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025

Peyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai meskipun secara substansi mengalami kendala dikarenakan belum tersusunya Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
  7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017.
  8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung
  9. Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  13. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 147 Tahun 2021 Tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.
  14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.
-

15. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 000.8./016 / 1345 C / BAPPERIDA/2025 Tanggal 20 Mei 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Pd Tahun 2025

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung 2025 dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025
2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Cikancung.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Cikancung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026;
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cikancung dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun 2025;
3. Tersedianya suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Cikancung.

### **1.4. Mekanisme Penyusunan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja Kecamatan Cikancung, proses penyusunan Renja Kecamatan Cikancung, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPd, Renstra dengan Renja

##### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Cikancung

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Cikancung serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Cikancung Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cikancung

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cikancung

2.4 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung  
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

### **BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

---

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Cikancung Tahun Lalu

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2021 - 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2025. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Cikancung melaksanakan 6 (Enam) program dengan 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. **6.671.911.242,00** untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD), Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja baru mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 92,93 % atau Rp. **6.200.391.888,00** Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut

#### **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 telah berhasil memberikan realisasi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target yang ditentukan, dengan demikian tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

---

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cikancung  
Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggara an pelayanan publik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	70	76,80	109,71%
		2. Persentase BMD dalam Kondisi baik	%	78	81,62	104,64%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Nilai	78	82,50	105,77%
		Persentase Desa yang beradministrasi baik	%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	3	3	100 %
<b>Rata-rata capaian</b>						<b>105,03</b>

## 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersebut adalah sebagai berikut :

### Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian	Menunjang/ tdk
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%	
	<b>PENDAPATAN</b>								
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.671.911.242,00</b>	<b>6.200.391.888,00</b>	<b>92,93</b>					
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.856.937.438,00	5.436.707.588,00	92,83					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.150.000,00	40.208.000,00	80,18					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.150.000,00	8.301.000,00	90,72	Dokumen	1	1	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	3.670.000,00	73,40	Dokumen	1	1	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000,00	3.757.000,00	62,62	Dokumen	1	1	100,00	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	24.480.000,00	81,60	Dokumen	1	1	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.059.605.438,00</b>	<b>4.702.629.917,00</b>	<b>92,94</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.043.605.438,00	4.690.529.917,00	93,00	Bulan	14	14	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.550.000,00	73,40	Dokumen	1	1	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	8.000.000,00	6.910.000,00	86,38	Dokumen	1	1	100,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	2.640.000,00	52,80	Dokumen	1	1	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>51,20</b>					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	2.560.000,00	51,20	Dokumen	1	1	100	100
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>148.121.000,00</b>	<b>131.260.600,00</b>	<b>88,62</b>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.998.500,00	99,95	Unit	34	34	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.113.000,00	80.167.900,00	96,46	Unit	4	4	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.998.400,00	99,97	Buah	6	6	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik	7.500.000,00	7.493.000,00	99,91	HOK	12	12	100,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	2.328.000,00	38,80	Buah	5	5	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.728.000,00	23.114.800,00	89,84	Eksemplar	87	87	100,00	100,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	HOK	12	12	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.780.000,00	7.160.000,00	60,78	HOK	12	12	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>257.122.550,00</b>	<b>242.380.331,00</b>	<b>94,27</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.122.500,00	25.542.000,00	68,80	Unit	7	7	100,00	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.290.000,00	92,90	Unit	5	5	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000,00	207.548.331,00	98,83	Unit	1	1	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.983.500,00</b>	<b>291.853.940,00</b>	<b>93,85</b>					
	Penyediaan Jasa Surat	3.000.000,00	1.010.000,00	33,67	Bulan	12	12	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.050.000,00	29.103.300,00	72,75	Bulan	12	12	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.933.500,00	261.740.640,00	97,69	Bulan	14	14	100,00	100,00
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>395.222.550,00</b>	<b>365.666.400,00</b>	<b>92,52</b>					

1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	9.943.200,00	9.554.200,00	96,09					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	9.943.200,00	9.554.200,00	96,09	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	17.839.800,00	16.304.000,00	91,39					
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.839.800,00	16.304.000,00	91,39	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
3	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	17.464.500,00	17.183.000,00	98,39					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	17.464.500,00	17.183.000,00	98,39	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
4	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	349.975.050,00	322.625.200,00	92,19					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	349.975.050,00	322.625.200,00	92,19	Kegiatan	4	4	100,00	100,00
III	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	149.750.300,00	145.680.100,00	97,28					
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	99.685.400,00	96.632.500,00	96,94					
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.685.400,00	96.632.500,00	96,94	Kegiatan	2	2	100,00	100,00
2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	50.064.900,00	49.047.600,00	97,97					
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.971.600,00	13.834.200,00	99,02	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.957.400,00	20.284.200,00	96,79	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.135.900,00	14.929.200,00	98,63	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	45.910.000,00	41.110.000,00	89,54					
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00					
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	30.910.000,00	26.110.000,00	84,47					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	30.910.000,00	26.110.000,00	84,47	Kegiatan	1	1	100,00	100,00

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	69.282.107,00	62.355.400,00	90,00					
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	69.282.107,00	62.355.400,00	90,00					
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	37.732.107,00	32.005.400,00	84,82	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.550.000,00	30.350.000,00	96,20	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
VI	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	37.742.320,00	37.327.800,00	98,90					
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	154.808.847,00	148.872.400,00	96,17					
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	74.992.847,00	74.288.400,00	99,06	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.816.000,00	23.850.000,00	96,11	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	30.000.000,00	28.177.000,00	93,92	Kegiatan	1	1	100,00	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesanaan di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	22.557.000,00	90,23	Kegiatan	1	1	100,00	100,00

### **3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.

### **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapa kali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikancung sehingga realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.

### **5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

Capaian Kinerja di Kecamatan Cikancung yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap

Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisch capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.**

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

- a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.
- b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
- c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 khususnya Kecamatan Cikancung berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun Anggaran 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian.

Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.1 (TC.29)**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung dan  
Pencapaian Renstra Kecamatan Cikancung s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)\*  
Kabupaten Bandung

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangka Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1	16.00	0	0	0	KECAMATAN	- Nilai SAKIP - Nilai BMD	- 71 - 80	- 75,96 - 77	- 70 - 78	- 76,80 - 78	100%	- 70 - 78	- 76,80 - 78	98%
7	1	16.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai BMD	- 71 - 80	- 75,96 - 77	- 70 - 78	- 76,80 - 78	100%	- 70 - 78	- 76,80 - 78	98%
7	1	16.00	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500%	100%	100%	50%	100%	100%	350%	80%
7	1	16.00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	80%

7	1	16.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	80%
7	1	16.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	60%
7	1	16.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,02	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>300%</b>	80%
7	1	16.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan	25 Orang/ 12 Bulan	25 Orang/ 12 Bulan	25 Orang/ 6 Bulan	100%	25 Orang/ 12 Bulan	75 Orang/ 12 Bulan	80%
7	1	16.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	80%
7	1	16.00	1	2,03	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>200%</b>	80%
7	1	16.00	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
1	5	.5..00	1	2,05	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0%

1	5	.5.00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	-	0	0%	
1	5	.5.00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0%
7	1	16.00	1	2,06	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>80%</b>	
7	1	16.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	10 Paket	100%	
7	1	16.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	80%	
7	1	16.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	80%	
7	1	16.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%	
7	1	16.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	80%	
7	1	16.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 Dokumen	-	4 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	80%	
7	1	16.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Peket	2 Paket	0 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%	
7	1	16.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%	
7	1	16.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%	
7	1	16.00	1	2,07	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>80%</b>	
7	1	16.00	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			100%		2 Unit	80%	

7	1	16.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	4 Unit			100%		4 Unit	80%
7	1	16.00	1	2,08	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	80%
7	1	16.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,09	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	80%
7	1	16.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 unit	7 unit	9 unit	2 unit	100%	9 unit	23 unit	80%
7	1	16.00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit				100%			0%
7	1	16.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	5 unit	5 unit	2 unit	100%	5 unit	15 unit	80%
7	1	16.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	0 unit	100%	1 unit	3 unit	80%
7	1	16.00	2	0	0	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>80,00</b>	<b>77,00</b>	<b>78,00</b>	<b>84,12</b>	<b>100%</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	80%

7	1	31.00	2	2,01	0	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	500%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80%
7	1	31.00	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	80%
7	1	31.00	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen				100%			0%
7	1	31.00	2	2,02	0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	31.00	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
7	1	31.00	2	2,03	0	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	31.00	2	2,03	1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	80%
7	1	16.00	2	2,04	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100%	0 dokumen	0 dokumen	0%
7	1	16.00	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	80%

7	1	16.00	3	0	0	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>80%</b>
7	1	16.00	3	2,01	0	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>80%</b>
7	1	16.00	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga	5 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	100%	0 Lembaga	5 Lembaga	80%
7	1	16.00	3	2,01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1 Laporan	0,5 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	80%
7	1	20.00	3	2,03	0	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>80%</b>
7	1	20.00	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	0 Lembaga	100%	5 Lembaga	10 Lembaga	80%
7	1	20.00	3	2,03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
7	1	20.00	3	2,03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	80%
7	1	16.00	4	0	0	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>80%</b>
7	1	16.00	4	2,01	0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>80%</b>
7	1	16.00	4	2,01	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
7	1	16.00	4	2,02	0	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase dalam pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>80%</b>



7	1	16.00	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20%	1 dokumen	3 dokumen	80%
7	1	16.00	6	2,01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen							0%
7	1	16.00	6	2,01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0%
7	1	16.00	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	80%
7	1	16.00	6	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	20%	1 Laporan	2 Laporan	80%

**Verifikator**

ttd

**AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.Si**

NIP. 19761213 201001 1 002

Cikancung, 28 Mei 2025

Camat Cikancung



**SUDRAJAT, S.Pd., MM**

NIP. 19680508 199103 1 006



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung**

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cikancung sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya.

**Tabel 2.2 (TC.30)**

Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cikancung  
Kabupaten Bandung

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	76	77	78	79	82,50		79	80	
2	Nilai AKIP	66,5	67	68	68,5	76,80		68,5	70	
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	76%	77%	78%	79%	81,64		79%	80%	
4	Persentase Desa Beradministrasi Baik	100%								
4	Jumlah Desa cepat Berkembang		3	2	2	3				

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

#### 1. Kinerja Kecamatan Cikancung

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

#### Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

- a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Cikancung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung yang terdiri dari 30 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
  1. Perizinan/ Rekomendasi

2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KIA, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
3. Melaksanakan Program Kewilayan
4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

## **2. Permasalahan dan Hambatan**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

### **A. Permasalahan :**

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Pemerintah Kecamatan Cikancung mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum Profesional;
- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- c. Belum Optimalnya Pelayanan kepada Masyarakat;
- d. Belum Optimalnya Pengadministrasian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
- e. Terjadinya Bencana alam (Banjir, longsor, Kekeringan lahan) di beberapa Wilayah Kecamatan Cikancung;
- f. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan;
- g. Masih Terdapatnya angka stunting, anak yang putus sekolah, serta masyarakat miskin ekstrim di Wilayah Kecamatan Cikancung;
- h. belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan UMKM ;
- i. Pengelolaan sampah belum Optimal;
- j. adanya kegiatan Galian C quari tanah yang kurang memperhatikan lingkungan Masyarakat sekitar
- k. belum adanya Pengelolaan pasar Tradisional yang sehat.

## **B. Hambatan :**

- a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum tersusun secara tepat dan belum terapkannya pada sebagian bidang kegiatan.
- c. Belum optimalnya SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan

### **3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.**

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.

### **4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada

#### **A. Kekuatan**

- 1) Adanya dukungan anggaran
- 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
- 3) Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan
- 4) sinergitas dan soliditas aparatur

#### **B. Kelemahan**

- 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru
- 2) Kapasitas SDM Aparatur
- 3) Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap
- 4) Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan disesuaikan dengan potensi masing – masing Kecamatan

#### **C. Tantangan**

- 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat

- 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahui tentang SOP pelayanan
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
- 4) Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)
- 5) Jauhnya jarak pelayanan Cikancung – Soreang khususnya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan

#### **D. Peluang**

- 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Antusiasme masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
- 3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

#### **5. Formulasi isu – isu penting**

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab
- 2) Melaksanakan Pembinaan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur
- 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan
- 4) Penyusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang
- 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan
- 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan
- 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan

## **2.4 Review terhadap Renja Tahun 2025**

### **1. Perbandingan Renja dengan hasil analisis kebutuhan**

Membandingkan Rencana Kerja (Renja) dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rencana Kerja (Renja) dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Rencana Kerja (Renja) dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut;

**Tabel TC.31**

Review Terhadap Rancangan Renja tahun 2025  
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

KODE REKENING	RANCANGAN RENJA 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	KECAMATAN				6,082,480,061	KECAMATAN				6,638,586,524
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	- Nilai IRB - Nilai IMR	71 Point 71 Point	5,360,930,061	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	- Nilai IRB - Nilai IMR	71 Point 71 Point	6,050,485,647
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	71 Point	65,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	71 Point	47,660,000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19,800,000
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,750,000
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	10,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	7,110,000
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4,732,930,061</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>5,322,525,647</b>
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,723,930,061	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	5,317,605,647
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	460,000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1 Dokumen	2,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1 Dokumen	460,000

			Prognosis Realisasi Anggaran					Prognosis Realisasi Anggaran		
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2,300,000</b>
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,300,000
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4,200,000</b>
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	1,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	4,200,000
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>82,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>77,680,000</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,000,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,680,000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>41,385,000</b>
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20,000,000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21,385,000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>323,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>386,395,000</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16,815,000

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366,580,000	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>123,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>168,340,000</b>	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	20,000,000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	145,340,000	
<b>Jumlah 1</b>					<b>5,360,930,061</b>	<b>Jumlah 1</b>					<b>6,050,485,647</b>
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	<b>79 Point</b>	<b>430,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	<b>79 Point</b>	<b>367,200,000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>10,000,000</b>	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000	

7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>20,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>70,000,000</b>
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	60,000,000
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>15,000,000</b>
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100 %</b>	<b>385,000,000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100 %</b>	<b>272,200,000</b>
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	385,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	272,200,000

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan</b>	100 %	100,000,000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan</b>	100 %	67,516,177
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa</b>	100 %	40,000,000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa</b>	100 %	40,000,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	100 %	45,000,000	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	100 %	18,906,177
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga K emasyara kat an	15,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5,770,000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	6,480,000
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,656,177
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	100 %	15,000,000	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	100 %	8,610,000

7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	15,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	8,610,000
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>45,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>45,000,000</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>15,000,000</b>
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>30,000,000</b>
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000

7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Cikancung	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	66,550,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Cikancung	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	57,100,000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100 %	66,550,000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100 %	57,100,000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	25,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	15,550,000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31,550,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31,550,000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase desa yang dibina dan diawasi</b>	100 %	80,000,000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase desa yang dibina dan diawasi</b>	100 %	51,284,700
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase desa yang dibina dan diawasi</b>	100 %	80,000,000	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase desa yang dibina dan diawasi</b>	100 %	51,284,700

7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7,160,000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7,090,000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25,000,000
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,034,700
	<b>Jumlah 2</b>				<b>721,550,000</b>	<b>Jumlah 2</b>				<b>588,100,877</b>
	<b>Jumlah Total</b>				<b>6,082,480,061</b>	<b>Jumlah Total</b>				<b>6,638,586,524</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Sosial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.



### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik pada penyelenggaraan Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Tabel 3.1

Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi	

	berkeadilan	PP8	Gerakan membangun desa		kerakyatan	
PN7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAA NMASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup			
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan social	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”***.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Membangkitkan daya saing Daerah
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Cikancung menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Serta berpedoman kepada Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung



### A. Tujuan

Tujuan Kecamatan Cikancung dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:

#### 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

### B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Adapun sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung untuk tahun 2025 adalah :

#### 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

Adapun target kinerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Target Kinerja Kecamatan Cikancung Tahun 2025

Sebelum Reviu Tujuan Kecamatan	Setelah Reviu Tujuan Kecamatan	Sebelum Reviu Sasaran Kecamatan	Setelah Reviu Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	1. Laju IKM	1. Nilai IKM	82 Point
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Sebelum Reviu Tujuan Kecamatan		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan				
		2. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa				

Sumber Perubahan Renstra Kecamatan Cikancung 2021-2026 dan hasil Keputusan internal Tim Penyusun Perubahan Renja 2025

Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cikancung pada Tahun Anggaran 2025. Berikut ini :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Laju IKM			
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Nilai IKM			
1	Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Cikancung	Meningkatnya Kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Cikancung	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Cikancung	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.8	Tersedianya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

1.1.9	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
<b>1.2</b>	<b>Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
1.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	
1.2.5	Tersedianya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
<b>1.3</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan</b>	
1.3.1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.2	Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.3	Terlaksanakannya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

1.2	<b>Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>		
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
1.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	
1.2.5	Tersedianya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan</b>		
1.3.1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.2	Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.3	Terlaksanakannya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.4	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu</b>		
1.4.1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1.4.2	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

1.4.3	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
1.4.4	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4.5	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>1.5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor</b>		
1.5.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.5.3	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	
1.5.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.5.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.5.6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1.5.7	Tersedianya Bahan/ Material yang dibutuhkan	Tersedianyan bahan / material	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
1.5.8	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
1.5.9	Terseleenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>1.6</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
1.6.1	Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianyan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
1.6.2	Terpenuhinya kebutuhan Mebel	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.6.3	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
<b>1.7</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1.7.1	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.7.2	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.7.3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.7.4	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
<b>1.8</b>	<b>Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD dalam Kondisi Baik</b>		
1.8.1	Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.8.2	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.3	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.4	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.5	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.1.2	Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.2	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan</b>		
2.2.1	Terlaksananya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
2.2.2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.3	<b>Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		
2.3.1	Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi/ sinergi dengan perangkat Dearah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.4	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan</b>		
2.4.1	Terseleenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzinaan non usaha	Terseleenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzinaan non usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
2.4.2	Terseleenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
3	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina</b>			
3.1	<b>Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3.1.2	Terciptanya harmonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tersedianya dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.1.3	Terlaksananya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.2	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terseleenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memilik Desa)</b>		<b>persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi</b>		
3.2.1	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	
3.2.3	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.2.4	Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan	TerFasilitasinya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.3	<b>Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>		
3.3.1	Memperkuat ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
3.3.2	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penguunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
3.3.3	Meningkatkan Kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan layak huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
3.3.4	Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Pertumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
3.3.5	Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pertumbuhan Keluarga dalam Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.3.6	Menyiapkan keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
3.3.7	Menyiapkan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
<b>4</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum</b>			
<b>4.1</b>	<b>Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		
4.1.1	Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.1.2	Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
<b>4.2</b>	<b>Terselenggaranya koordinasi penerepan dan penegakkan</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan</b>		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	<b>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			<b>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		
4.2.1	Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
<b>5</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah</b>			
<b>5.1</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		
5.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.1.2	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional	
5.1.3	Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
5.1.4	Meningkatnya kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
5.1.5	Tertanganinya konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
5.1.6	Terselenggaranya Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
<b>6</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>2. Meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang dibina dan diawasi</b>			
<b>6.1</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase Desa yang dibina</b>		
6.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
6.1.2	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
6.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.4	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.5	Terakomodirnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
6.1.6	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6.1.7	Terjalinnnya kerjasama antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
6.1.8	Terselenggaranya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
6.1.9	Tersusunnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terfasilitasinya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan	
6.1.10	Terselenggaranya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan**

##### 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Cikancung secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

##### 2) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cikancung Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pelayanan Masyarakat.

#### **b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

##### 1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikancung Tahun 2025 adalah 6 (Enam) program dengan 17 (Tiga belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan didalamnya.

##### 2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikancung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cikancung, yang meliputi semua Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Cikancung dan juga Kantor Kecamatan Cikancung sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di Wilayah Kabupaten Bandung.

- 3) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.671.911.242 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rekapitulasi Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah – Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana/pagu indikatif tersaji dalam Tabel T-C 33

**Tabel TC.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Bandung**

KODE REKENING	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	usulan Perubahan	Tambah/ Kurang	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	KECAMATAN				6,082,480,061	6,638,586,524	556,106,463	PAD dan DAU			5,871,087,980.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	- Nilai IRB - Nilai IMR	71 Point 71 Point	5,360,930,061	6,050,485,647	689,555,586	PAD dan DAU	Disesuaikan Perubahan Renja hasil Verifikasi BAPERIDA	71,5 Point 71,5 Point	5,305,087,980.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	71 Point	65,000,000	47,660,000	-17,340,000	PAD		71,5 Point	54,450,000.00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0	PAD		2 Dokumen	3,150,000.00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0	PAD		2 Dokumen	1,000,000.00

7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0	PAD		2 Dokumen	2,150,000.00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000	19,800,000	-10,200,000	PAD		2 Laporan	33,150,000.00
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10,000,000	5,750,000	-4,250,000	PAD			10,000,000.00
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	10,000,000	7,110,000	-2,890,000	PAD			5,000,000.00
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>4,732,930,061</b>	<b>5,322,525,647</b>	<b>589,595,586</b>	<b>PAD dan DAU</b>		100 %	4,790,152,980.00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,723,930,061	5,317,605,647	593,675,586	PAD dan DAU		26 Orang/bulan	4,780,652,980.00

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000	460,000	-2,040,000	PAD		1 Laporan	3,000,000.00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	0	PAD		12 Laporan	4,000,000.00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,500,000	460,000	-2,040,000	PAD		1 Dokumen	2,500,000.00
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD</b>	<b>100 %</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>-1,700,000</b>	<b>PAD</b>		100 %	2,000,000.00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,000,000	2,300,000	-1,700,000	PAD		1 Laporan	2,000,000.00
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>PAD</b>		100 %	10,000,000.00

			<b>Kepegawaian yang tepat waktu</b>								
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	1,000,000	4,200,000	3,200,000	PAD		10 Orang	10,000,000.00
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>82,000,000</b>	<b>77,680,000</b>	<b>-4,320,000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>44,000,000.00</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000	3,000,000	0	PAD		2 Paket	3,000,000.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	40,000,000	0	PAD		4 Paket	20,000,000.00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	5,000,000	0	PAD		2 Paket	2,500,000.00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	5,000,000	0	PAD		1 Paket	2,000,000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	4,000,000	0	PAD		4 Paket	3,000,000.00

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0	PAD		4 Dokumen	500,000.00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	0	PAD		1 Laporan	4,000,000.00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,000,000	6,680,000	-4,320,000	PAD		12 Laporan	6,000,000.00
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>30,000,000</b>	<b>41,385,000</b>	<b>11,385,000</b>	<b>PAD</b>		100 %	40,000,000.00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20,000,000	20,000,000	0	PAD		0 Unit	0.00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	21,385,000	11,385,000	PAD		3 Unit	10,000,000.00
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>323,000,000</b>	<b>386,395,000</b>	<b>63,395,000</b>	<b>PAD</b>		100 %	250,485,000.00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	0	PAD		12 Laporan	3,000,000.00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	16,815,000	-13,185,000	PAD		12 Laporan	10,005,000.00

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290,000,000	366,580,000	76,580,000	PAD		12 Laporan	237,480,000.00
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase BMD dalam Kondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>123,000,000</b>	<b>168,340,000</b>	<b>45,340,000</b>	<b>PAD</b>		100 %	114,000,000.00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	20,000,000	20,000,000	0	PAD		7 Unit	11,000,000.00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000	3,000,000	0	PAD		5 Unit	3,000,000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	145,340,000	45,340,000	PAD		1 Unit	100,000,000.00
<b>Jumlah 1</b>					<b>5,360,930,061</b>	<b>6,050,485,647</b>	<b>689,555,586</b>				<b>245,000,000.00</b>
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	<b>82 Point</b>	<b>430,000,000</b>	<b>367,200,000</b>	<b>-62,800,000</b>	<b>PAD</b>		<b>82 Point</b>	<b>245,000,000.00</b>
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000	10,000,000	0	PAD		100 %	10,000,000.00

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0	PAD		1 Laporan	10,000,000.00
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>20,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>PAD</b>		100 %	20,000,000.00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0	PAD			10,000,000.00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	60,000,000	50,000,000	PAD		1 Laporan	10,000,000.00
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		100 %	15,000,000.00

7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0	PAD		1 Dokumen	15,000,000.00
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	100 %	385,000,000	272,200,000	-112,800,000	PAD		100 %	200,000,000.00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	385,000,000	272,200,000	-112,800,000	PAD		4 Laporan	200,000,000.00
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina</b>	100 %	100,000,000	67,516,177	-32,483,823	PAD		100 %	110,000,000.00
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa</b>	100 %	40,000,000	40,000,000	0	PAD		100 %	40,000,000.00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	0	PAD		1 Laporan	40,000,000.00

7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>45,000,000</b>	<b>18,906,177</b>	<b>-26,093,823</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>45,000,000.00</b>
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	15,000,000	5,770,000	-9,230,000	PAD		5 Lembaga	15,000,000.00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	6,480,000	-8,520,000	PAD		1 Laporan	15,000,000.00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	15,000,000	6,656,177	-8,343,823	PAD		1 Laporan	15,000,000.00
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>15,000,000</b>	<b>8,610,000</b>	<b>-6,390,000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>25,000,000.00</b>
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	15,000,000	8,610,000	-6,390,000	PAD		100 Keluarga	25,000,000.00

7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	100 %	45,000,000	45,000,000	0	PAD	100 %	55,000,000.00
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100 %	15,000,000	15,000,000	0	PAD	100 %	25,000,000.00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	0	PAD	1 Laporan	25,000,000.00
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	100 %	30,000,000	30,000,000	0	PAD	100 %	30,000,000.00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000	30,000,000	0	PAD	2 Laporan	30,000,000.00

7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100 %	66,550,000	57,100,000	-9,450,000	PAD		100 %	66,000,000.00
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100 %	66,550,000	57,100,000	-9,450,000	PAD		100 %	66,000,000.00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000	10,000,000	0	PAD		60 Orang	11,000,000.00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	25,000,000	15,550,000	-9,450,000	PAD		85 Orang	25,000,000.00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	1 Dokumen	31,550,000	31,550,000	0	PAD		1 Dokumen	30,000,000.00

			Pimpinan di Kecamatan								
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa</b>	100 %	80,000,000	51,284,700	-28,715,300	PAD		100 %	90,000,000.00
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Cikancung	<b>Persentase desa yang dibina dan diawasi</b>	100 %	80,000,000	51,284,700	-28,715,300	PAD		100 %	90,000,000.00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000	7,160,000	-2,840,000	PAD		1 Dokumen	10,000,000.00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20,000,000	7,090,000	-12,910,000	PAD		1 Dokumen	20,000,000.00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,000,000	0	-5,000,000	PAD		0 Dokumen	0.00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1 Dokumen	20,000,000	25,000,000	5,000,000	PAD		1 Dokumen	30,000,000.00

			Pembangunan Desa								
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000	12,034,700	-12,965,300	PAD		1 Laporan	30,000,000.00
	<b>Jumlah 2</b>				<b>721,550,000</b>	<b>588,100,877</b>	<b>-133,449,123</b>				
	<b>Jumlah Total</b>				<b>6,082,480,061</b>	<b>6,638,586,524</b>	<b>556,106,463</b>				

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cikancung Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Perubahan Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

**Tabel IV.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Kecamatan Cikancung**

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	7.01	KECAMATAN	Kecamatan Cikancung	Nilai Laju IKM	71 Point	6,223,870,347	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	Disesuaikan dengan kebutuhan, Verifikasi BAPERIDA
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	Nilai IRB Nilai IMR	71 Point 71 Point	6,050,485,647	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	71 Point	47,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	7,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	<b>5,322,525,647</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	5,317,605,647	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	

		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	<b>2,300,000</b>		
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	<b>4,200,000</b>		
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	<b>77,680,000</b>		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	<b>41,385,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>386,395,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16,815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>168,340,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	145,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	<b>79 Point</b>	<b>367,200,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>10,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	<b>70,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	<b>15,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	<b>272,200,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	272,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina</b>	<b>100 %</b>	<b>67,516,177</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	<b>40,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	<b>18,906,177</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	6,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,656,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	<b>8,610,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	8,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>45,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	<b>15,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	<b>30,000,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100 %</b>	<b>57,100,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	<b>57,100,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	15,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Cikancung</b>	<b>Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa</b>	<b>100 %</b>	<b>51,284,700</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	<b>51,284,700</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Cikancung</b>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,034,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Cikancung maupun nasional. Rencana awal ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergi

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Cikancung dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

CAMAT CIKANCUNG

ttd

SUDRAJAT

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## KECAMATAN CIKANCUNG

Jalan Raya Cikancung –Ciluluk No 06 Cikancung Kode Pos : 40396 Telp/Fax (022)7948228

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat

Email: [kec.cikancung@bandungkab.go.id](mailto:kec.cikancung@bandungkab.go.id) website: [kecamatan cikancung.bandungkab.go.id](http://kecamatan cikancung.bandungkab.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANCUNG

**NOMOR** : 700/KEP.61/V/2025  
**LAMPIRAN** : II ( DUA )

#### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

#### CAMAT CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026, maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja ( PERUBAHAN RENJA)
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22)
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
- 16 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2025 Tanggal 01 Juli 2025 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- 17 Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2025 Tanggal 07 Maret 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.
- PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Camat Cikancung Kabupaten Bandung ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat visi, misi, strategis, kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Peraturan Camat Cikancung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikancung  
Pada tanggal : 26 Mei 2025

CAMAT CIKANCUNG,



**SUDRAJAT,S.Pd.,M M**

Pembina Tk.I

NIP. 19680508 199103 1 006

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Cikancung

Nomor : 700/KEP.61/V/2025  
Tanggal : 26 Mei 2025  
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Penyusunan  
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Cikancung

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025**

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>
Penanggungjawab	: Sekretaris Kecamatan Cikancung
Ketua	: Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
	1 Kasi Pemerintahan
	2 Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	3 Kasi Pembangunan
	4 Kasi Sosial Budaya
	5 Kasi Trantibum
	6 Kasubag Umpeg
	7 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Ditetapkan di : Cikancung  
Pada tanggal : 26 Mei 2025

CAMAT CIKANCUNG,



**SUDRAJAT,S.Pd.,M M**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680508 199103 1 006

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Cikancung

Nomor : 700/KEP.61/V/2025  
Tanggal : 26 Mei 2025  
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Penyusunan  
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Cikancung

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
( PERUBAHAN RENJA)  
KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025**

• **PENANGGUNGJAWAB**

- Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Camat Cikancung
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

• **KETUA:**

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

• **ANGGOTA:**

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Cikancung;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- Melakukan telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Merumuskan kegiatan prioritas Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025;
- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Perubahan Renja bidangnya masing-masing pada Kecamatan Cikancung;

- Melaksanakan penyempurnaan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Kecamatan Cikancung;
- Menyesuaikan dokumen rancangan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**Formulir E. 70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat daerah**  
**Kabupaten Bandung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim Penyusun renja Perangkat daerah dan Penyusun Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah Kabupaten/Kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja - Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra -Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting peyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan Rencana Kerja (Renja) RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Cikancung, Juni 2025

CAMAT CIKANCUNG



**SUDRAJAT, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk I

NIP. 19680508 199103 1 006